



**Kebijakan Pendidikan Inklusif:  
Implementasinya Pada Satuan Pendidikan Dasar  
di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia**

**Mukhlis**

Kepala Bidang Promosi, Dinas Pariwisata Prov. Sulawesi Selatan

**ABSTRAK**

Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar di Sulawesi Selatan telah terimplementasi pada 83 sekolah dasar di dua belas kabupaten/kota. Latar tersebut menjadi dasar perumusan tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif dari aspek tingkat penerimaan implementasi kebijakan, proses implementasi kebijakan dan perilaku kelompok sasaran. Populasi meliputi semua stakeholders pendidikan sekolah dasar yang mengimplementasikan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan berdasar metode *multistage proporsional random sampling*, dengan menggunakan instrumen terhadap 309 responden, meliputi: a) kepala sekolah, b) guru, dan c) komite sekolah. Analisis data *Structural Equation Models* (SEM).

Hasil penelitian; tingkat penerimaan implementasi pendidikan inklusif kurang berhasil sedangkan tingkat penerimaan implementasi tergolong berhasil. Proses implementasi belum terlaksana. Sedangkan pada perilaku kelompok sasaran, implementasi kebijakan termasuk berhasil. Faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan, antara lain faktor internal; a) kebebasan berinteraksi, b) kesamaan akses, c) sosialisasi, d) manajemen, e) isi kebijakan, dan faktor eksternal; a) koordinasi, dan b) lingkungan inklusif.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif

**PENDAHULUAN**

Pendidikan inklusif merupakan konsekuensi dari kebijakan global *Education for All* yang dicanangkan pada tahun 1990. Kebijakan pendidikan untuk semua merupakan upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam pendidikan yang dicanangkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1949. Konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak memiliki hak untuk menerima pendidikan yang tidak diskriminatif atas dasar hambatan fisik,

etnisitas, agama, bahasa, gender, dan kecakapan. Pendidikan inklusif yang dideklarasikan dalam Konferensi Dunia tentang pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus di Salamanca, Spanyol, dan Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal, merupakan suatu pendekatan yang berusaha memenuhi kebutuhan belajar semua anak, pemuda, dan orang dewasa dengan fokus khusus pada mereka yang termarjinalisasikan dan tersisihkan.

Sebagai wujud kepedulian dan keseriusan pemerintah terhadap anak yang

berkebutuhan khusus melalui Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Jakarta mengeluarkan surat edaran Nomor: 380/C.C6/MN /2003 tanggal 20 Januari 2003. Isi surat edaran tersebut diharapkan kepada masing-masing kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya empat buah, meliputi jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan jenjang sekolah menengah atas (Purwanto, dkk: 3 6).

Jumlah sekolah yang mengimplementasikan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2008 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada awal penerapan pendidikan inklusif, yaitu tahun 2003 jumlah sekolah penyelenggara sebanyak sebelas sekolah. Data terakhir dari pengelola pendidikan inklusif pada Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan sampai tahun 2008 sebanyak 93 sekolah dan tersebar pada dua belas kabupaten/kota. Adapun penyebaran jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu Taman Kanak-Kanak sebanyak 1 sekolah, Sekolah Dasar sebanyak 83 sekolah, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 7 sekolah, dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 2 sekolah. Dari dua belas kabupaten/kota pelaksana pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan, Kota Makassar tercatat sebagai yang terbanyak yaitu 65 sekolah, terdiri dari 1 sekolah Taman Kanak-Kanak, 56 Sekolah Dasar, 6 Sekolah Menengah Pertama, dan 2 Sekolah Menengah Atas. Dengan demikian jumlah sekolah dasar pada ibu kota provinsi sebanyak 56 sekolah dan sebanyak 27 sekolah dasar tersebar pada sebelas kabupaten/kota.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 jumlah siswa yang belajar di sekolah pelaksana pendidikan inklusif se Sulawesi Selatan sebanyak 2.113 orang. Rincian dan penyebaran berdasarkan jenis kelainan dan

kesulitan belajar siswa adalah sebagai berikut: tuna netra sebanyak 70 orang, tuna rungu sebanyak 29 orang, 77 orang tuna grahita, tuna daksa sebanyak 30 orang, tuna laras sebanyak 17 orang, antis sebanyak 105 orang, lambat belajar sebanyak 963, tuna wicara sebanyak 12 orang, berbakat sebanyak 5 orang, dan kategori kesulitan belajar sebanyak 805 orang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kebijakan Publik

Riant Nugroho (2007) mengemukakan bahwa pernyataan kebijakan sejajar dengan ilmu pengetahuan. Pernyataan kebijakan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: 1) pernyataan kebijakan desainatif, yakni kebijakan yang bersumber dari fakta-fakta empirik, 2) pernyataan kebijakan evaluatif, yakni kebijakan yang mempersoalkan nilai-nilai, dan 3) pernyataan kebijakan advokatif, adalah kebijakan yang mempersoalkan tindakan. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007, tentang pedoman umum formulasi, implementasi, evaluasi kinerja, dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah yang ditetapkan pada bulan April 2007 memberikan batasan tentang pengertian kebijakan secara umum bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut (Riant Nugroho, 2009).

Menurut Hogwood dan Gunn (1984) bahwa secara teoritis, suatu isu akan cenderung memperoleh respons dari pembuat kebijakan untuk dijadikan agenda kebijakan publik kalau memenuhi beberapa kriteria tertentu. Di antara sejumlah kriteria itu menyangkut beberapa isu penting, ialah:

- a. Mencapai suatu titik kritis tertentu,

sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja, atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang jika tidak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih hebat di masa datang.

- b. Mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak yang bersifat dramatik.
- c. Menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, bahkan umat manusia pada umumnya, dan mendapat dukungan berupa liputan media massa yang luas.
- d. Menjangkau dampak yang amat luas.
- e. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
- f. Menyangkut suatu persediaan yang fashionable, yang posisinya sulit untuk dijelaskan tetapi mullah dirasakan kehadirannya.

## 2. Implementasi Kebijakan

Talcott Parsons (dalam Campbell, 1990) memberikan penekanan pada kelangsungan suatu sistem, yang disebutnya sebagai sistem sosial total dan mempunyai ciri bahwa sub sistem yang satu tidak lepas dari sumbangan sub sistem lainnya. Beliau mengatakan bahwa, untuk menjaga kelangsungan suatu sistem harus memiliki empat subsistem yang saling memberi sumbangan satu sama lain, yaitu:

- a. Pencapaian tujuan. Dimaksudkan bahwa setiap individu dalam organisasi mempunyai peran untuk diperankan dalam bentuk aksi atau tindakan guna mendukung tujuan organisasi.
- b. Adaptasi. Dimaksudkan adanya penyesuaian terhadap lingkungan dan situasi yang berbeda antara satu dengan lingkungan lainnya, sehingga konflik tidak terjadi.
- c. Integrasi. Mempunyai pengertian bahwa terciptanya hubungan kooperatif antar individu dalam suatu organisasi, agar komunikasi dapat

berjalan dan menghilangkan kebekuan informasi.

- d. Latensi atau pemeliharaan. Sub sistem ini menekankan kepada setiap individu menginternalisasikan secara sukarela untuk mematuhi norma dan ketentuan yang berlaku.

Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi diartikan sebagai suatu keseluruhan dari proses implementasi kebijakan, baru bisa dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang bersifat umum telah terinci. Program sudah dirancang dan sejumlah sarana telah disediakan untuk mewujudkan tujuan serta sasaran kebijakan, publik. Sedangkan Palumbo (1987) menyatakan bahwa permasalahan ada pada penelitian dan bukan perbedaan antara kegagalan implementasi dan permasalahan yang hasilnya berasal dari disain kebijakan. Palumbo juga mengkritisi model *top-down* yang condong pada asumsi bahwa tujuan dan objektivitas para pembuat kebijakan menjadi superior bagi para pembuat kebijakan pada tingkat pelaksana di bawahnya karena gagalnya mengadaptasikan implementasi yang lebih penting sesuai yang diinginkan. Sedangkan Love dan Sederberg (1987) menawarkan satu kemungkinan. Mereka berpendapat bahwa kebijakan dapat dilihat sebagai teori dan implementasi sebagai usaha untuk menterjemahkan teori ke dalam suatu aksi atau tindakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam suatu tindakan, teori secara internal memiliki konsistensi, yaitu konsistensi dengan kebijakan konvensional, kapasitas administrasi, dan sumberdaya, serta dukungan politik atau momentum yang dapat digunakan.

Goggin, dkk (1990) mengatakan bahwa koordinasi implementasi merupakan bagian dari perspektif komunikasi antar pemerintah. Mereka memandang implementasi dari kebijakan yang disusun antar pemerintah dengan kerangka didasarkan pada "pesan,

pemesan, hubungan, dan target operasi yang menjadi batas sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini menyediakan pesan-pesan politik yang diberikan kepada orang yang ditunjuk, ketidakleluasaan, harapan, dan desakan dalam kerangka antar pemerintahan.

Beberapa pendapat atau teori mengemukakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel atau faktor tertentu. Menurut Edwards III (1980) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pandangan Mazmanian, dkk (1983) mengatakan bahwa dalam proses implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu, (1) Kemampuan memahami karakteristik masalah, (2) Kemampuan institusi pelaksana, (3) variabel lingkungan.

Grindle (1980) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu. Isi kebijakan (content of policy), meliputi: (a) kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, (b) jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran, (c) target yang dicapai oleh kebijakan tersebut, (d) ketepatan lokasi penempatan implementasi, (e) implementornya, sudah ditetapkan, (f) kebijakan tersebut sudah didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan Meter dan Horn (1975) mengemukakan bahwa ada enam variabel yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai harus jelas, karena bilamana terjadi sebaliknya maka akan terjadi penafsiran yang berbeda-beda dan mudah menimbulkan konflik antar agen pelaksana.
- b. Sumber daya. Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
- c. Komunikasi antar organisasi. Dalam

implementasi program kebijakan diperlukan dukungan, koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

- d. Karakteristik agen pelaksana, mencakup struktur birokrasi, aturan-aturan, dan pola hubungan dalam organisasi berpengaruh terhadap implmentasi kebijakan.
- e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yaitu berupa dukungan masyarakat setempat berpengaruh atas implementasi dan terwujudnya tujuan yang ingin dicapai..
- f. Disposisi implementor, yaitu respons, kognisi, dan intensitas yang dimiliki oleh implementor.

### 3. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Indonesia

Implementasi kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Wujud kepedulian pemerintah dalam meringankan beban biaya orang tua dan menunjang penuntasan wajib belajar Sembilan tahun diamanahkan pada ayat (2) pasal yang sama, yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan bagi anak yang memiliki kelainan baik fisik, mental maupun intelegensi diamanahkan pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat (2) bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 32 ayat (1) pada undang-undang yang sama dijelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Sebagai wujud upaya pemerintah dalam memerangi diskriminasi pendidikan

di Indonesia, pada tanggal 8 sampai dengan 14 Agustus 2004 dilaksanakan Deklarasi Bandung dan menghasilkan butir-butir kebijakan dalam implementasi pendidikan inklusif yang ditanda tangani oleh Menteri Pendidikan Nasional, Bank Dunia, IDP Norway, dan EENET Asia. Kebijakan tersebut menghimbau kepada pemerintah, Institusi pendidikan, Institusi terkait, dunia usaha dan industri, dan masyarakat untuk dapat:

- a. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya sehingga menjadi generasi penerus yang handal.
- b. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu sesuai dengan merugikan eksistensi kehidupannya, baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis, maupun kultural.
- c. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergi dan produktif di antara para *stakeholders*, terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha, dan industri, orang tua, serta masyarakat.
- d. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemenuhan anak berkelainan, dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka, dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal.
- e. Menjamin kebebasan anak berkelainan, dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi, baik secara reaktif maupun pro aktif dengan siapapun, kapanpun, dan di lingkungan manapun dengan meminimalkan hambatan.

- f. Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media massa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan lainnya secara berkesinambungan.
- g. Menyusun rencana aksi (*action Plan*) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non-fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, dan kesejahteraan bagi semua anak (Kompedium, 2007: 53-54).

Pedoman pelaksanaan bagi pelaksana pendidikan inklusif di Indonesia adalah buku terbitan Direktorat Pendidikan Luar Biasa Dirjen Mandikdasmen Jakarta yang terdiri dari tujuh buah, satu diantaranya merupakan gambaran umum dari pendidikan inklusif dan beberapa penjelasan tentang istilah yang digunakan. Enam buku lainnya berisikan harapan dan keinginan untuk mewujudkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran (URP) dengan memberikan contoh dan pendekatan pembelajaran yang dimungkinkan digunakan oleh tenaga pendidik, orang tua, masyarakat, instansi terkait, dan tenaga kependidikan lainnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupaya mengungkap dan mendeskripsikan implementasi pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mengetahui berbagai keterhubungan antar variabel yang bersifat prediksi dan infrensial. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, adalah pendekatan kuantitatif dengan lokus penelitian ini adalah di Sulawesi Selatan. Populasi dari penelitian ini adalah sernua sekolah dasar yang mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 83 sekolah dengan responden adalah personil yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif yaitu Kepala Sekolah, guru dan orang tua murid berkebutuhan khusus pada sekolah tersebut.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage proporsional random sampling (*Multistage Proportional Random Sample*), dengan jumlah sekolah sebagai sampel sebanyak 30 sekolah dan jumlah responden penelitian ini sebanyak 309 orang. Variabel yang digunakan pada penelitian ini, adalah variabel: 1) tingkat penerimaan kebijakan pendidikan inklusif oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota ( $independen=X1$ ), 2) tingkat penerimaan kebijakan pendidikan inklusif oleh satuan pendidikan ( $independen=X2$ ), 3) proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif ( $intervening=Y1$ ), dan 4) perilaku kelompok sasaran ( $dependen=Y2$ ). Untuk mengolah data survey digunakan software statistika melalui computer. Software yang digunakan adalah AMOS 6.00.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif

Tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota dapat diketahui berdasarkan hasil analisis atas distribusi jawaban responden yang menunjukkan bahwa perolehan nilai kebijakan pemerintah daerah untuk kategori kadang-kadang lebih besar dibandingkan kebijakan pemerintah daerah untuk kategori lainnya. Jika kelima kategori responden jawaban ditransformasikan dengan menggunakan tiga klasifikasi, yaitu belum berhasil, kurang berhasil, dan berhasil, menunjukkan bahwa tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota tergolong kurang berhasil dengan perolehan persentase terbesar 42,07 persen. Atas dasar kedua hasil dari tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, baik berdasarkan hasil rerata terhadap nilai

maksimum, maupun berdasarkan frekuensi distribusi jawaban responden pada kelima kategori pada instrumen penelitian dapat dikatakan bahwa tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota tergolong kurang berhasil.

Sedangkan pada tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif oleh satuan pendidikan dapat diketahui berdasarkan hasil analisis atas distribusi jawaban responden pada instrumen penelitian menunjukkan bahwa aksi atau tindakan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan cukup baik, walaupun belum optimal sebagaimana hasil analisis yang menunjukkan sebesar 74,75 persen dari 309 responden mengenai aksi atau tindakan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, yaitu aksi atau tindakan berupa isi kebijakan, koordinasi, dan sosialisasi. Apabila jawaban responden ditransformasi ke dalam tiga klasifikasi, yaitu belum berhasil, kurang berhasil, dan berhasil dikatakan bahwa tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif oleh satuan pendidikan tergolong berhasil dengan perolehan persentase sebesar 38,50 persen.

### 2. Proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif

Data hasil analisis distribusi frekuensi, persentase, dan kategori variabel proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif menunjukkan bahwa aksi atau tindakan yang dilakukan oleh implementor, yaitu berupa, dukungan, kerjasama, manajemen, dan sarana pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan belum terlaksana dengan baik sebagaimana hasil analisis yang menunjukkan sebesar 40,46% dari 309 responden memberikan tanggapan tidak tabu dan tidak pernah ada aksi atau tindakan yang dilakukan oleh implementor, berupa dukungan, kerjasama,

manajemen, dan sarana dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan. Berdasarkan analisis data maka proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa belum ada aksi atau tindakan yang dilaksanakan oleh implementor Aksi atau tindakan tersebut berupa, dukungan, kejasama, manajemen, dan sarana.

### 3. Perilaku kelompok sasaran

Sedangkan mengenai perilaku kelompok sasaran implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa terjadi perubahan perilaku yang sangat baik dari kelompok sasaran implementasi pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan sebagaimana hasil analisis yang menunjukkan sebesar 72,49 persen dari 309 responden memberikan tanggapan sering atau selalu mengalami perubahan perilaku pada kepala sekolah, guru, dan komite sekolah terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan yaitu berupa perilaku kesamaan akses, perlakuan manusiawi, lingkungan inklusif, dan kebebasan berinteraksi perilaku. Berdasarkan data yang telah dianalisis bahwa telah terjadi perubahan perilaku dari Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah berupa perilaku kesamaan akses, perlakuan manusiawi, lingkungan inklusif, dan kebebasan berinteraksi pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan.

### 4. Keterkaitan Antar Variabel Implementasi Kebijakan, Proses Implementasi Kebijakan dan Perilaku Sasaran.

Berdasarkan hasil analisis model tahap akhir dengan menggunakan *standardized regression weights*, menunjukkan bahwa urutan variabel yang memberikan sumbangan langsung terhadap variabel lainnya, berturut-turut adalah: 1)

variabel proses implementasi kebijakan terhadap variabel kelompok sasaran, sebesar 0,669, 2) variabel tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif oleh satuan pendidikan terhadap variabel proses implementasi kebijakan, sebesar 0,581, 3) variabel tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota terhadap proses implementasi, sebesar 0,190, 4) variabel tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif oleh Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota) terhadap kelompok sasaran sebesar 0,071, dan 5) variabel tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif oleh satuan pendidikan terhadap kelompok sasaran, sebesar 0,023.

Besarnya sumbangan dari keempat variabel penelitian ini terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar di Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa urutan dari faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar di Sulawesi Selatan, adalah: 1) koordinasi, sebesar 0,765, 2) kebebasan berinteraksi, sebesar 0,726, 3) kesamaan akses, sebesar 0,723, 4) sosialisasi sebesar 0,673, 5) manajemen sebesar 0,659, 6) lingkungan inklusif, sebesar 0,659, 7) isi kebijakan sebesar 0,651, 8) kerjasama sebesar 0,622, 9) sarana sebesar 0,577, 10) perlakuan manusiawi, sebesar 0,561, dan 11) dukungan sebesar 0,518.

Berdasarkan analisis data tersebut di atas, maka adapun faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar di Sulawesi Selatan, sebagaimana dikemukakan di atas, diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan eksternal, maka klasifikasi tersebut sebagai berikut:

a. Faktor internal yang sangat berpengaruh terhadap implementasi

kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar di Sulawesi Selatan, adalah (1) kebebasan berinteraksi, (2) kesamaan akses, (3) sosialisasi, (4) manajemen, (5) isi kebijakan.

- b. Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan dasar di Sulawesi Selatan, adalah (1) koordinasi, (2) lingkungan inklusif.

## PENUTUP

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dan sesuai permasalahan serta hipotesis penelitian ini, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Sulawesi Selatan kurang berhasil karena masih terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang kelancaran implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Sedangkan pada tingkat penerimaan implementasi kebijakan pendidikan inklusif oleh satuan pendidikan di Sulawesi Selatan tergolong berhasil karena kesiapan sekolah yang mengimplementasikan pendidikan inklusif melakukan pengelolaan dan penerapan manajemen sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan belum terlaksana dengan baik karena adanya dualisme layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang ada dan antara keduanya belum jelas batasan jenis anak berkebutuhan yang menjadi objeknya, serta penerapan skala prioritas bagi pemerintah dalam mendukung suatu program.
- c. Perilaku kelompok sasaran

implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan termasuk berhasil karena terjadi perubahan perilaku positif pada kepala sekolah, guru, dan komite atas kesamaan akses, perlakuan manusiawi, lingkungan inklusif, dan kebebasan berinteraksi.

- d. Faktor yang sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan yaitu faktor internal, berupa (1) kebebasan interaksi, (2) kesamaan akses, (3) sosialisasi, (4) manajemen, (5) isi kebijakan, dan faktor eksternal, berupa, (1) koordinasi, dan (2) lingkungan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Braillo Norway dan IDP Norway. 2007. Kompendium Perjanjian, Hukum dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif, Edisi ketiga.*
- Campbell, Tom. 1990. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan.* Kanisius, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas. 2007. Kompendium: Perjanjian, Hukum dan Peraturan Menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak Kualirtas Pendidikan Dalam Cara Inklusif Respons Sektor Pendidikan terhadap HIV dan AIDS. (Edisi Ketiga). Unesco: Direktorat Pendidikan Luar Biasa dan Braillo Norway.*
- Edwards III George C. 1980. *Implementing Public Policy* Washington: Congressional Quarterly Press.
- Goggin M. L., Bowman A. O'M., Lester J. P., dan O'Toole L. J. 1990. *Implementation Theory and*



- Practie. Toward a Third Generation.* England : Addison-Wesley.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World:* Princeton University Press, New Jersey.
- Hogwood Brian W. And Lewis A. Gunn. 1984. *Policy Analysis for The Real World.* England: Oxford University Press.
- Love Janie., and Peter C. Sederberg. 1987. Euphony and Cacophony in Policy Implementation: SCF and the Somali Refugee Problem. *Policy Studies Review* 9.
- Mazmanian Daniel A., dan Sabitier Paul A. 1983. *Implementation and Public Policy.* New Jersey: Scott Foresman and Company, New Jersey.
- Meter Donald S. Van., dan Horn Carl E. Van. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.* Administration Societ.
- Palumbo Dennis. 1986. *Privatization and Corrective Policy Studies Review.*
- Riant Nugroho D. 2007. *Analisis Kebyakan.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.